



Daerah Berburu Opini WTP

Penyerahan LKPD TA 2018

Opini Badan Pemeriksa Keuangan

- Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan
- Laporan disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria
 - Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
 - Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
 - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 - Efektivitas sistem pengendalian intern.



Jenis Opini BPK

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

- Laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material.
- Auditor meyakini pemerintah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi dengan baik
- Kalaupun ada kesalahan, dianggap tidak berpengaruh signifikan

2. Wajar dengan Pengecualian (WDP)

- Audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian
- Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil)
- Ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi laporan keuangan keseluruhan

3. Tidak Wajar (TW)

- Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material
- Laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Auditor meyakini laporan keuangan diragukan kebenarannya
- Bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan

4. Tidak Menyatakan Pendapat

- Auditor menolak beri pendapat
- Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini keuangan wajar atau tidak
- Misalnya auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti menyatakan laporan wajar

INTERGRITAS - Semua kepala daerah di Kalbar menghadiri pencanangan pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat serta Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2018 oleh pemerintah daerah kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Aula Perwakilan BPK Kalbar, Jumat (29/3).

IST/HUMAS KKR

Sumber: BPK RI GRAFIK: ENRO




Beberapa tahun terakhir Kubu Raya selalu mendapatkan opini WTP. Tentunya ini kembali menjadi target kita bersama seluruh SKPD.

Sujiwo
Wakil Bupati Kubu Raya

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalbar terus berupaya mendorong akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota agar semua daerah di bawah lingkup provinsi ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Sejauh ini, tersisa empat daerah di Kalbar yang belum mendapatkan predikat opini WTP.

Berdasarkan penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh BPK, empat daerah di Kalbar yang belum

memperoleh WTP yakni Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan optimistis dengan semangat menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel disertai pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), target agar semua daerah meraih opini WTP bisa direalisasikan. Olehnya itu, ia meminta adanya pengawasan BPK yang lebih komprehensif.

"Tinggal empat (daerah) yang belum meraih predikat opini WTP, saya kira ini tidak herat. Sebagai pemimpin baru, kami sangat mendukung pengelolaan keuangan harus menyandang predikat WTP dan bagaimana lebih transparan dan akuntabel," kata Ria Norsan saat menghadiri kegiatan Penyerahan LKPD TA 2018 dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar, Jumat (29/3).

Untuk itu, dia mengharapkan tahun ini, keempat Kabupaten ini bisa memperoleh opini WTP dari BPK RI. Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Pemkab dan Pemkot se-Kalbar siap untuk diaudit oleh BPK RI.



"Kami siap diaudit kembali dan berharap semoga semua yang telah meraih opini WTP tetap dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk kabupaten yang belum meraih opini WTP diharapkan tahun ini bisa meraihnya," tandas Norsan.

Ia mengatakan, Kalbar meminta Pemprov dan Pemkab/ Pemkot untuk tetap dapat meningkatkan kualitas kinerja agar semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas hidup disegala bidang bagi masyarakat Kalimantan Barat agar lebih baik lagi.

"Kita berikan apresiasi kepada BPK RI perwakilan Kalbar yang menetapkan zona integritas bebas wilayah korupsi. Supaya kita ini ada rambu-rambu yang mengingatkan kita untuk tidak terjerumus masalah korupsi," katanya.

Dikatakannya, BPK Perwakilan Provinsi Kalbar telah melakukan Pemeriksaan Interim dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci setelah penyerahan laporan keuangan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 297 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono mengatakan, bagi pemerintah daerah baik di kabupaten dan kota yang ada di Kalbar untuk menyerahkan LKPD tepat waktu.

"Dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memicu dan pacu daerah-daerah yang belum menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Karena ini di-

saksikan oleh daerah-daerah lainnya sehingga menimbulkan semangat untuk menyerahkan laporan keuangannya dengan waktu yang telah ditentukan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo menegaskan target Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018. Dirinya optimistis opini WTP dapat kembali diraih sebagaimana capaian empat tahun terakhir, di mana Kabupaten Kubu Raya selalu mendapatkan predikat tersebut.

"Beberapa tahun terakhir Kubu Raya selalu mendapatkan opini WTP. Tentunya ini kembali menjadi target kita bersama seluruh SKPD. Semuanya sudah bekerja keras melakukan pengelolaan aset dan keuangan ini secara baik sehingga pada akhirnya kita berharap dapat mempertahankan opini tersebut," tutur Sujiwo se usai menekan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Aula Perwakilan BPK Kalbar.

Selain pengelolaan keuangan dan aset yang baik, Sujiwo menyatakan perlunya komunikasi dengan pihak-pihak berkompeten seperti BPK dan BPKP. Menurutnya, BPK selalu membuka diri untuk memberikan masukan dan arahan, baik kepada daerah-daerah yang sudah mendapatkan opini WTP maupun daerah yang belum mendapatkannya.

"Nah, konsultasi dan koordinasi ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita maju-mundur atau alergi untuk melakukan komunikasi tersebut. Terbuka saja, jika memang ada hal-hal yang memang harus ditanyakan, dikonsultasikan, atau dikoordinasikan," pesannya.

Pemkot 7 Kali WTP

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah

tujuh kali menerima predikat WTP, bahkan Gubernur Kalbar Sutarmidji memberikan langsung piagam penghargaan WTP tersebut pada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono pada Kamis 13 Desember 2018, di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalbar.

"Total insentif yang kita dapat Rp 57 miliar. Insentif itu tidak hanya dari WTP, APBD tepat waktu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelayanan kesehatan dan lainnya juga," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.

WTP yang disandang untuk ke tujuh kalinya ini, kata Edi, bukan berarti tidak ada temuan. Diakuinya, masih ada temuan-temuan namun bersifat administratif dan nomenklatur sehingga tidak terlalu signifikan. "Umumnya berkaitan dengan aturan dan nomenklatur yang harus disesuaikan," tuturnya.

Untuk meningkatkan kualitas WTP ke depan, ia menyebut, perlu ada kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Pontianak untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas temuan tersebut. "Sehingga ke depan tidak ada lagi temuan yang sama," ujarnya.

Ia juga berharap ke depan tidak ada lagi temuan-temuan yang baru. Karenanya, seluruh OPD diminta dapat memperbaiki kinerjanya terutama kaitan dengan tata kelola keuangan sehingga temuan-temuan itu kian berkurang, bahkan nihil serta mampu mempertahankan predikat WTP kembali sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. "Kita berharap juga untuk laporan keuangan tahun ini bisa mempertahankan predikat WTP seperti halnya yang sudah diraih sebelumnya," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Pemkot Pontianak tercatat meraih predikat WTP selama tujuh kali berturut-turut, yakni di tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. (*fian/oni)